

# Analisis Perencanaan Strategis Koperasi Desa Merah Putih dalam Perspektif Manajemen Pembangunan: Studi Kasus Kabupaten Bone Bolango

Alexander H Badjuka<sup>1</sup>, Danil Y Patah<sup>2</sup>, Zaskia Matahar<sup>3</sup>, Salwantri Hasim<sup>4</sup>, Fasya Apriliyana Thaib<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo

## Article Info

### Article history:

Received May, 2026  
Revised May, 2026  
Accepted May, 2026

### Kata Kunci:

Perencanaan Strategis  
Koperasi Desa  
Manajemen Pembangunan  
Kebijakan Publik  
Kabupaten Bone Bolango

### Keywords:

Strategic Planning  
Village Cooperative  
Development Management  
Public Policy  
Bone Bolango Regency

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan strategis Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif manajemen pembangunan di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen melalui kajian kebijakan, publikasi resmi, dan sumber sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan strategis didominasi oleh pendekatan top-down yang efektif dalam mempercepat pembentukan koperasi, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Implementasi di tingkat desa memperlihatkan adanya adaptasi lokal, meskipun masih terbatas pada aspek prosedural. Temuan juga mengungkap adanya kesenjangan antara capaian kuantitatif dan kesiapan operasional koperasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia, pendekatan partisipatif, serta pergeseran orientasi dari pembentukan menuju keberlanjutan koperasi.

## ABSTRACT

This study aims to analyze the strategic planning of the Merah Putih Village Cooperative from a development management perspective in Bone Bolango Regency. A qualitative approach with document analysis was employed using policy documents, official publications, and relevant secondary sources. The findings reveal that strategic planning is dominated by a top-down approach, which is effective in accelerating cooperative formation but lacks institutional capacity strengthening and community participation. At the village level, implementation shows local adaptation, although it remains largely procedural. The study also identifies a gap between quantitative achievements and operational readiness. These findings highlight the importance of strengthening human resource capacity, promoting participatory approaches, and shifting the focus from establishment to sustainability of cooperatives.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Corresponding Author:

Name: Danil Y Patah  
Institution: Program Studi Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo  
Email: [danialypatah@gmail.com](mailto:danialypatah@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Koperasi telah lama diposisikan sebagai salah satu instrumen utama dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan prinsip kebersamaan dan gotong royong, koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap modal, pengembangan usaha, serta penguatan kapasitas ekonomi lokal (Feriyanty et al., 2026). Dalam praktiknya, koperasi juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang mampu memperluas peluang usaha dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi (Fhikri et al., 2022).

Dalam konteks kebijakan pembangunan, pemerintah Indonesia kembali menegaskan pentingnya koperasi melalui program Koperasi Desa Merah Putih yang ditetapkan sebagai agenda nasional. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan koperasi secara masif di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengarahkan pembentukan kelembagaan ekonomi di tingkat desa.

Meskipun memiliki tujuan yang strategis, implementasi kebijakan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pendekatan top-down dalam pembentukan koperasi berpotensi mengabaikan aspek partisipasi masyarakat serta kondisi sosial lokal yang menjadi faktor penting dalam keberhasilan koperasi (Policy Brief INPRES 9/2025). Selain itu, pembentukan koperasi dalam skala besar seringkali menghadapi kendala pada tahap operasional, seperti keterbatasan model bisnis dan belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal (Imam & Sofia, 2024).

Di tingkat implementasi, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas manajerial, literasi keuangan, serta tata kelola organisasi menjadi faktor utama yang menghambat kinerja koperasi (Hamzah, 2025; Arga et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kelembagaan secara formal, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan kesiapan sumber daya manusia.

Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu daerah yang menunjukkan capaian signifikan dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Namun demikian, capaian kuantitatif tersebut perlu ditelaah lebih lanjut untuk memahami bagaimana proses perencanaan strategis yang dilakukan serta sejauh mana perencanaan tersebut mampu menjawab kebutuhan dan kondisi lokal masyarakat.

Sejumlah studi sebelumnya lebih banyak menyoroti peran koperasi dalam pembangunan ekonomi atau dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, namun kajian yang secara khusus menganalisis proses perencanaan strategis koperasi desa, terutama dalam konteks kebijakan Koperasi Desa Merah Putih, masih relatif terbatas. Padahal, perencanaan strategis merupakan tahap krusial yang menentukan arah, efektivitas, dan keberlanjutan organisasi koperasi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan strategis Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif manajemen pembangunan di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika interaksi antara kebijakan pembangunan yang bersifat terpusat dengan kondisi lokal, serta memberikan implikasi bagi penguatan perencanaan dan pengelolaan koperasi desa yang lebih berkelanjutan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Koperasi Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Lokal*

Koperasi secara konseptual merupakan lembaga ekonomi berbasis anggota yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip kebersamaan, partisipasi, dan

gotong royong. Dalam konteks pembangunan, koperasi tidak hanya berperan sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan (Feriyanty et al., 2026).

Berbagai studi menunjukkan bahwa koperasi mampu memperkuat ekonomi lokal melalui penyediaan akses terhadap modal, peningkatan kapasitas usaha, serta penciptaan peluang ekonomi baru bagi Masyarakat (Fhikri et al., 2022). Hal ini menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas (Wardana et al., 2025).

Namun demikian, efektivitas koperasi sangat bergantung pada kualitas pengelolaan dan tingkat partisipasi anggota. Koperasi yang tidak didukung oleh manajemen yang baik dan keterlibatan anggota yang aktif cenderung mengalami stagnasi dan tidak mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

## **2.2 Perencanaan Strategis dalam Pengembangan Koperasi**

Perencanaan strategis dalam koperasi merupakan proses penting yang menentukan arah pengembangan organisasi, termasuk dalam penentuan model usaha, pengelolaan sumber daya, dan pencapaian tujuan jangka panjang. Dalam praktiknya, perencanaan strategis koperasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus berbasis analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi.

Pendekatan seperti analisis SWOT banyak digunakan dalam pengembangan koperasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi (Mohammad et al., 2024). Penerapan pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta memperkuat daya saing koperasi dalam menghadapi dinamika ekonomi.

Namun, pada banyak kasus koperasi desa, perencanaan strategis masih belum dilakukan secara optimal. Perencanaan cenderung bersifat normatif dan belum didukung oleh analisis yang komprehensif, sehingga berdampak pada lemahnya keberlanjutan usaha koperasi.

## **2.3 Kebijakan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih**

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan kebijakan nasional yang dirancang untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan koperasi secara masif. Kebijakan ini secara eksplisit mendorong percepatan pembentukan koperasi di seluruh wilayah Indonesia melalui pendekatan terpusat (top-down) (LPPM STIKOSA, 2026). Dalam implementasinya, pendekatan ini memungkinkan percepatan pencapaian target pembentukan koperasi dalam jumlah besar. Namun, sejumlah kajian menunjukkan bahwa pendekatan top-down memiliki keterbatasan, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat dan kesesuaian dengan kondisi local (Kopdesa.com, 2026)

Penelitian di berbagai daerah juga menunjukkan bahwa meskipun pembentukan koperasi berjalan cepat, masih terdapat tantangan seperti kendala legalitas, keterbatasan model bisnis, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal (Imam & Sofia, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan implementasi di tingkat lokal.

## **2.4 Kapasitas Kelembagaan dan Tantangan Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih**

Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan koperasi adalah kapasitas kelembagaan, yang mencakup kemampuan manajerial, literasi keuangan, serta tata kelola organisasi. Berbagai studi menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas pengurus dan anggota menjadi salah satu penyebab utama tidak optimalnya kinerja koperasi (Arga et al., 2025).

Selain itu, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prinsip koperasi juga menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi anggota (Fatimatuzzahro et al.,

2025). Kondisi ini berdampak pada lemahnya fungsi koperasi sebagai lembaga ekonomi kolektif.

Penelitian lain juga menegaskan bahwa meskipun partisipasi masyarakat dalam pembentukan koperasi relatif tinggi, pemahaman terhadap manfaat dan mekanisme koperasi masih terbatas (Pakabu et al., 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pembentukan kelembagaan dan kesiapan sosial masyarakat.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen untuk mengkaji perencanaan strategis Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif manajemen pembangunan di Kabupaten Bone Bolango. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumen kebijakan, publikasi resmi pemerintah, artikel ilmiah, serta berita daring yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menyeleksi dan mengkategorikan dokumen berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan, sehingga memungkinkan identifikasi pola perencanaan strategis serta dinamika implementasinya.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen yang digunakan. Meskipun terbatas pada data sekunder, pendekatan ini tetap mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perencanaan strategis koperasi desa, khususnya dalam melihat keterkaitan antara kebijakan, proses perencanaan, dan kondisi lokal.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Arah Perencanaan Strategis dalam Kerangka Kebijakan Pembangunan

Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan strategis Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bone Bolango tidak lahir dari dinamika lokal semata, melainkan merupakan bagian dari desain kebijakan pembangunan nasional yang diturunkan ke tingkat daerah. Regulasi daerah mempertegas posisi koperasi sebagai instrumen strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dominasi peran pemerintah dalam tahap awal perencanaan memperlihatkan bahwa model yang digunakan cenderung bersifat *directive planning*, di mana arah, target, dan indikator keberhasilan telah ditentukan sebelumnya.

Pendekatan ini terbukti efektif dalam mempercepat pencapaian target pembentukan koperasi di tingkat desa. Hal ini terbukti dari capaian pembentukan koperasi yang mencapai sekitar 89% desa dalam waktu relatif singkat. Namun, dalam perspektif manajemen pembangunan, pendekatan yang terlalu terpusat berpotensi mengabaikan dimensi partisipasi masyarakat serta kondisi sosial lokal yang menjadi fondasi keberlanjutan koperasi (Feriyanty et al., 2026). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kebijakan berbasis instruksi cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek, bukan subjek pembangunan, sehingga dapat melemahkan rasa kepemilikan kolektif terhadap koperasi.

Dari perspektif manajemen pembangunan, kondisi ini menunjukkan efektivitas pendekatan *top-down* dalam mendorong akselerasi program. Namun, efektivitas tersebut lebih berkaitan dengan pencapaian output (jumlah koperasi terbentuk), bukan outcome (kinerja dan keberlanjutan koperasi). Dengan demikian, perencanaan yang terpusat mampu mempercepat implementasi, tetapi berpotensi menyisakan persoalan pada tahap penguatan kelembagaan.

#### 4.2 Struktur dan Tahapan Perencanaan Strategis Koperasi

Perencanaan strategis koperasi dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari musyawarah desa, penyusunan rencana usaha, hingga legalisasi kelembagaan. Musyawarah desa berfungsi sebagai titik awal legitimasi sosial, di mana masyarakat dilibatkan dalam penetapan

pembentukan koperasi serta struktur organisasi awal. Pola ini juga ditemukan dalam berbagai studi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di daerah lain, yang menunjukkan adanya tahapan formal yang seragam dalam proses pembentukan koperasi (Pakabu et al., 2025).

Keterlibatan masyarakat dalam forum tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka besar perencanaan bersifat terpusat, terdapat ruang partisipasi di tingkat lokal. Namun demikian, partisipasi tersebut cenderung bersifat prosedural, karena keputusan pembentukan koperasi pada dasarnya telah diarahkan oleh kebijakan di atasnya.

Tahapan berikutnya berupa penyusunan rencana usaha dan model bisnis koperasi mencerminkan upaya mengarahkan koperasi sebagai entitas ekonomi yang produktif. Penentuan jenis usaha dilakukan dengan mempertimbangkan potensi desa, sehingga terdapat indikasi bahwa perencanaan tidak sepenuhnya seragam.

Dalam perspektif manajemen strategis, tahapan ini menunjukkan adanya integrasi antara perencanaan organisasi dan perencanaan bisnis. Akan tetapi, tidak ditemukan indikasi kuat bahwa analisis strategis seperti analisis SWOT atau pemetaan risiko dilakukan secara sistematis di tingkat desa (Mohammad et al., 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan masih berada pada tahap administratif, belum sepenuhnya berbasis analisis strategis yang mendalam.

#### 4.3 Adaptasi Lokal dalam Implementasi Perencanaan

Implementasi perencanaan di tingkat desa memperlihatkan dinamika yang lebih fleksibel dibandingkan kerangka kebijakan yang bersifat terpusat. Studi pada Desa Toto Utara menunjukkan bahwa pembentukan koperasi dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat, serta mempertimbangkan kebutuhan ekonomi lokal. Namun, partisipasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan substantif masyarakat. Sejumlah studi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam koperasi seringkali terbatas pada tahap awal pembentukan, sementara pemahaman terhadap prinsip dan manfaat koperasi masih relatif rendah (Pakabu et al., 2025).

Jenis usaha yang direncanakan cenderung mengikuti karakteristik wilayah, seperti sektor pertanian, perdagangan, dan layanan simpan pinjam. Temuan ini mengindikasikan bahwa perencanaan strategis mengalami proses adaptasi di tingkat lokal, sehingga tidak sepenuhnya bersifat seragam.

Dalam perspektif pembangunan partisipatif, kondisi ini menunjukkan adanya kombinasi antara pendekatan top-down dan bottom-up. Pemerintah menyediakan kerangka dan target, sementara masyarakat menyesuaikan implementasi dengan kondisi lokal. Kombinasi ini dapat meningkatkan relevansi program, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas masyarakat dalam mengelola koperasi secara mandiri.

Selain itu, rendahnya literasi koperasi dan keterbatasan pemahaman terhadap tata kelola organisasi menjadi kendala utama dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat (Fatimatuzzahro et al., 2025). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara proses formal perencanaan dan kesiapan sosial masyarakat dalam mengelola koperasi secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan perencanaan tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan masyarakat secara formal, tetapi juga oleh kualitas partisipasi yang didasarkan pada pemahaman dan kapasitas yang memadai.

#### 4.4 Peran Pemerintah dalam Pengendalian dan Evaluasi

Peran pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada tahap perencanaan, tetapi juga mencakup pengendalian dan evaluasi. Pemerintah terlibat dalam sosialisasi, pendampingan teknis, serta monitoring pembentukan koperasi di seluruh desa.

Kewajiban pelaporan berkala dan evaluasi kinerja koperasi menunjukkan bahwa sistem perencanaan telah dilengkapi dengan mekanisme akuntabilitas. Dalam perspektif governance, kondisi ini mencerminkan *model state-centered governance*, di mana pemerintah menjadi aktor dominan dalam mengarahkan dan mengawasi program pembangunan. Model ini efektif dalam

menjaga konsistensi implementasi, tetapi dapat mengurangi otonomi kelembagaan koperasi jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas internal.

Namun, dominasi peran pemerintah juga berpotensi menimbulkan ketergantungan kelembagaan, di mana koperasi menjadi kurang mandiri dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa koperasi sebagai organisasi ekonomi seharusnya memiliki otonomi dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan kesejahteraan anggota (Imam & Sofia, 2024)

Dengan kata lain, semakin kuat kontrol pemerintah, semakin tinggi risiko ketergantungan koperasi terhadap intervensi eksternal. Keseimbangan antara peran pemerintah dan kemandirian koperasi menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan kelembagaan.

#### 4.5 Kesenjangan antara Perencanaan dan Kesiapan Kelembagaan

Meskipun capaian pembentukan koperasi relatif tinggi, hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan kesiapan kelembagaan di tingkat desa. Salah satu indikasi utama adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan pengelolaan koperasi. Kondisi ini mengarah pada situasi di mana koperasi terbentuk secara administratif, tetapi belum sepenuhnya siap beroperasi secara optimal. Hal ini konsisten dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa koperasi seringkali tidak berjalan optimal akibat lemahnya kapasitas pengurus dan anggota dalam mengelola organisasi (Arga et al., 2025).

Dalam tinjauan manajemen pembangunan, fenomena ini sering muncul pada program yang berorientasi pada target kuantitatif dalam jangka pendek. Jika tidak diikuti dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem manajemen koperasi, maka koperasi berpotensi mengalami stagnasi atau bahkan tidak berfungsi secara efektif. Dengan demikian, keberhasilan perencanaan tidak dapat diukur hanya dari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi juga dari kualitas operasional dan keberlanjutannya.

### 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan strategis Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bone Bolango dibentuk dalam kerangka kebijakan yang kuat dan terarah, dengan pendekatan yang dominan bersifat *top-down*. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mendorong percepatan pembentukan koperasi di tingkat desa, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan aspek substantif perencanaan, terutama dalam hal analisis strategis dan kesiapan kelembagaan.

Di sisi lain, implementasi di tingkat desa memperlihatkan adanya adaptasi terhadap kondisi lokal melalui mekanisme partisipatif seperti musyawarah desa. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan strategis tidak sepenuhnya bersifat seragam, melainkan mengalami penyesuaian sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan rendahnya pemahaman terhadap prinsip koperasi menjadi kendala utama dalam memastikan keberlanjutan kelembagaan.

Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan perencanaan pembangunan berbasis koperasi tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pencapaian target, tetapi juga oleh kualitas proses perencanaan dan kesiapan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan partisipatif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pergeseran orientasi dari pembentukan menuju keberlanjutan koperasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian manajemen pembangunan, khususnya terkait dinamika interaksi antara kebijakan terpusat dan konteks lokal dalam perencanaan strategis koperasi desa. Namun, keterbatasan penggunaan data sekunder membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang dapat menggali secara lebih mendalam perspektif aktor di tingkat lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arga, C. S., Kridho, H. G., & Riyadi, N. (2025). Pendampingan Optimalisasi Koperasi Merah Putih Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Bendunganjati. *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional*, 05(05), 54–66.
- Fatimatuzzahro, A., Naila, K., Abdini, R., Oktanajma, L., Muhammad, R., Ziya'ul, A., Ma'arif, I., Cita, W., Rizqi, N., Khafidhoh, L., Rizqiyah, L., Miftah, A., & Sukron, A. (2025). Strategi Sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih untuk Pengembangan Ekonomi Lokal di Desa Warukidul Bersama Mahasiswa KKN UIN Gusdur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(7), 3492–3500. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v3i7.3054>
- Feriyanty, R., Putri, D. A., Aria, V., & Hayati, F. (2026). Kontribusi Koperasi terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(November 2025).
- Fhikri, R., Attoriq, R., & Putra, H. A. R. T. (2022). Peran Koperasi Dalam Pembangunan Ekonomi Di Desa Bajak II Kabupaten Bengkulu Tengah. *JKB Jurnal Kewirausahaan & Bisnis*, 4(2), 45–48.
- Hamzah, A. (2025). *Manajemen Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih (Pertama)*. Gemilang Press Indonesia.
- Imam, S., & Sofia, T. S. (2024). Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Mendirikan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sukodadi, Lamongan. *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2(2), 306–312.
- Kopdesa.com. (2026). Panduan Teknis Pendirian dan Digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih. *Sasuka Online Indonesia*, 18.
- LPPM STIKOSA, A. (2026). *Menakar Merah-Putih dalam Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih*.
- Mohammad, H. F., Afif, M. T., & Listian, I. A. (2024). Strategi Pengembangan Koperasi Dengan Analisis SWOT. *Jurnal ABDIMAS Indonesia*, 2(1), 33–39. <https://doi.org/10.59841/jurai.v2i1.1033>
- Pakabu, D. V. L., Sabandar, S. Y., & Pasae, Y. (2025). Analisis Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih : Studi Kasus Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung di Kabupaten Manokwari Selatan. *Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)*, 1(2), 287–292.
- Wardana, M. I. S., Ismail, I., Mursalin, I. A., & Rosyadi, A. A. (2025). Analisis Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi di Bengkulu. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(9), 1873–1890. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i9.4432>